

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latarbelakang

Kemiskinan merupakan salah satu persoalan yang tidak pernah luput dari perhatian pemerintah suatu negara dibelahan dunia manapun. Kemiskinan bahkan menjadi persoalan fenomenal dalam bidang ekonomi yang menjadi titik acuan keberhasilan pemerintah negara dari waktu ke waktu, terlebih pada negara yang sedang berkembang. Di kabupaten kepulauan sula sebagai salah satu kabupaten yang masuk kategori tidak berkembang menyadari bahwa pentingnya memperhatikan masalah kemiskinan dan mengusahakan segala upaya untuk menekannya dalam agenda tahunan pemerintah. Bahkan menjadi *masterplan* perencanaan pembangunan dalam jangka panjang untuk meningkatkan perekonomian dan mengurangi tingkat kemiskinan.

Tentu sudah lumrah diketahui bahwa jika berbicara tentang kemiskinan tentu akan berbicara mengenai pembangunan, mengingat *term* ini adalah dua sumbu yang tak bisa dipisahkan dan saling mempengaruhi satu sama lain. Pembangunan adalah suatu proses perubahan menuju arah yang lebih baik dan terus-menerus untuk mencapai tujuan yaitu mewujudkan masyarakat kabupaten kepulauan sula yang berkeadilan, berdaya saing, maju, dan sejahtera Tujuan pembangunan sendiri sebagaimana yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alenia keempat yaitu untuk memajukan kesejahteraan umum. Berbagai kegiatan pembangunan telah dilaksanakan demi tercapainya kesejahteraan umum. Masyarakat

dapat disebut sejahtera apabila masyarakat tersebut telah dapat memenuhi kebutuhan hidupnya secara mandiri. Permasalahan yang dihadapi oleh banyak yang menyangkut kesejahteraan masyarakat adalah ketidakmampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya (Sri, 2010: 358-366). Kesejahteraan dapat diartikan salah satunya dengan tingkat kemiskinan penduduk. Kesejahteraan sendiri mempunyai hubungan negatif terhadap tingkat kemiskinan, semakin rendah tingkat kemiskinan maka semakin tinggi tingkat kesejahteraan penduduk.

Menurut para ahli ekonomi (Arsyad, 2010: 299) kemiskinan di kabupaten kepulauan sula bersifat multidimensial. Kemiskinan yang bersifat multidimensial dapat dilihat dari berbagai aspek diantaranya aspek primer dan aspek sekunder. Aspek primer berupa miskin asset, organisasi sosial politik, dan pengetahuan serta keterampilan yang rendah. Sedangkan aspek sekunder berupa miskin akan jaringan sosial, sumber keuangan dan informasi. Dilain sisi, kemiskinan juga dikatakan sebagai persoalan yang kompleks karena tidak hanya berkaitan dengan masalah rendahnya tingkat pendapatan dan konsumsi, tetapi berkaitan juga dengan rendahnya tingkat pendidikan, kesehatan serta ketidakberdayaannya untuk berpartisipasi dalam pembangunan serta berbagai masalah yang berkenaan dengan pembangunan manusia. Dimensi-dimensi kemiskinan tersebut termanifestasikan dalam bentuk kekurangan gizi, air, perumahan yang sehat, perawatan kesehatan yang kurang baik, dan tingkat pendidikan yang rendah (Wijayanti, 2005: 215 – 225).

Salah satu akar permasalahan kemiskinan yaitu jumlah penduduk yang tinggi. Angkatan kerja yang besar akan terbentuk dari jumlah penduduk yang tinggi.

Menurut Malthus, kenaikan jumlah penduduk yang terus-menerus merupakan unsur yang perlu untuk menunjang tambahan permintaan, namun disisi lain kenaikan jumlah penduduk yang tinggi dikhawatirkan akan menimbulkan efek yang buruk terhadap pertumbuhan ekonomi. Menurut Todaro (2000: 236) pertumbuhan penduduk yang cepat mendorong timbulnya masalah keterbelakangan dan membuat prospek pembangunan menjadi semakin jauh. Kenaikan jumlah penduduk tanpa dibarengi dengan kemajuan faktor-faktor perkembangan yang lain tentu tidak akan menaikkan pendapatan dan permintaan. Dengan demikian, tumbuhnya jumlah penduduk justru akan menurunkan tingkat upah dan berarti pula memperendah biaya produksi. Turunnya biaya produksi akan memperbesar keuntungan-keuntungan para kapitalis dan mendorong mereka untuk terus memproduksi. Tetapi keadaan ini hanya sementara sifatnya, sebab permintaan efektif (*effective demand*) akan semakin berkurang karena pendapatan buruh juga semakin berkurang.

Akar permasalahan kemiskinan kaitannya dengan jumlah penduduk yang tinggi adalah keberadaan lapangan pekerjaan yang tidak bisa menampung kebutuhan angkatan kerja yang tercipta tersebut, sehingga terciptalah pengangguran yang berujung terhadap pembentukan kemiskinan. Pengangguran adalah jumlah tenaga kerja dalam perekonomian yang aktif mencari pekerjaan tetapi belum memperolehnya (Sukirno, 2004: 28). Sedangkan menurut Mankiw (2006: 154), pengangguran adalah masalah 4

makro ekonomi yang mempengaruhi manusia secara langsung dan merupakan masalah yang paling berat. Salah satu unsur yang menentukan kemakmuran suatu masyarakat adalah tingkat pendapatan. Pendapatan masyarakat mencapai maksimum apabila kondisi tingkat penggunaan tenaga kerja penuh (*full employment*) dapat terwujud, jika tidak maka akan terjadi pengangguran. Efek buruk dari pengangguran adalah mengurangi tingkat pendapatan masyarakat dan dengan begitu akan memberikan dampak domino mengurangi tingkat kemakmuran. Semakin turun tingkat kemakmuran masyarakat karena pengangguran tentunya akan meningkatkan peluang terjebak dalam kemiskinan dan akan menimbulkan masalah lain yaitu kekacauan politik dan sosial (Sukirno, 2010: 24).

Penumpukan jumlah angkatan kerja tentu akan memberikan beban tambahan bagi perekonomian suatu negara apabila tidak disertai dengan perluasan dan penciptaan lapangan kerjanya. Jika lowongan kerja baru tidak bisa menampung semua angkatan kerja baru maka akan memperpanjang barisan pengangguran yang sudah ada (Dumairy, 1997: 68). Oleh sebab itu, tidak mengherankan jika pengangguran dikatakan sebagai salah satu faktor yang mempengaruhi kemiskinan.

Kemiskinan sebagai masalah berskala nasional selalu dihadapi setiap pemerintahan. Kemiskinan terjadi dari akumulasi berbagai persoalan dan melibatkan banyak dimensi pokok. Menurut Makmun dalam Rusdarti (2013: 1-9) kemiskinan memiliki empat dimensi pokok, yaitu: (1) kurangnya kesempatan/*lack of opportunity*; (2) rendahnya kemampuan/*low*

capabilities; (3) kurangnya jaminan/*low- level of security*; dan (4) ketidakberdayaan/*low of capacity or empowerment*. Bank Dunia sendiri menyebut bahwa kemiskinan sebagai hasil dari akuntabilitas dan tanggungjawab institusi negara (World Bank 2001). Menyadari bahwa kemiskinan bersifat multi-dimensi dan mencerminkan akuntabilitas dan tanggungjawab dari institusi negara, maka upaya pengentasan kemiskinan menjadi salah satu obyek tanggungjawab pemerintah.

Permasalahan kemiskinan menuntut adanya campur tangan pemerintah. Dengan adanya campur tangan pemerintah diharapkan permasalahan kemiskinan dapat ditanggulangi. Campur tangan pemerintah lebih kurang sudah sering masyarakat dengar dan rasakan baik dalam tingkat nasional maupun daerah, contoh dalam setiap kampanye pemilihan umum selalu tersodor rencana program penanggulangan kemiskinan, dalam realisasinya pun sudah pernah ada Bantuan Langsung Tunai/Sementara, BOS dalam bidang pendidikan, asuransi kesehatan masyarakat miskin, PNPM (program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri), raskin (beras miskin), dan lainnya. Didalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 27 sendiri sudah diamanatkan bahwa tiap warga negara Indonesia berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Hal ini berarti pemerintah bertanggung jawab terhadap masalah kesejahteraan masyarakat, salah satunya adalah masalah kemiskinan yang dialami oleh setiap

terdapat dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) merupakan salah satu komponen kebijakan fiskal yang bertujuan untuk meningkatkan laju investasi, kesempatan kerja, memelihara kestabilan ekonomi, dan menciptakan distribusi pendapatan yang merata (Amalia, 2015: 183 – 189). Pengeluaran pemerintah yang digambarkan pada APBN pada prinsipnya bertujuan untuk sebesar-besarnya dimanfaatkan bagi pelayanan masyarakat dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Pengeluaran pemerintah dari tahun ke tahun terlihat bahwa mengalami tren naik, ini mengindikasikan bahwa meningkatnya peranan pemerintah dalam sektor ekonomi. Dumairy (1996: 158) menyebutkan bahwa pemerintah melakukan banyak sekali pengeluaran untuk membiayai kegiatan-kegiatannya. Pengeluaran-pengeluaran itu tidak hanya untuk menjalankan roda pemerintahan sehari-hari, akan tetapi juga membiayai kegiatan perekonomian. Ini bukan berarti pemerintah ikut berbisnis, melainkan pemerintah harus berkontribusi menggerakkan dan merangsang kegiatan ekonomi secara umum.

Berdasarkan latar belakang masalah yang dipaparkan diatas, penulis merasa tertarik untuk mengkaji bagaimana pengaruh jumlah penduduk, pengangguran, dan pengeluaran pemerintah terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia.

Kemiskinan telah membuat jutaan anak-anak tidak bias mengenyam pendidikan yang berkualitas, kesulitan membiayai kesehatan, kurangnya hubungan dan tidak adanya investasi, kurangnya akses ke pelayanan publik, kurangnya lapangan pekerjaan, kurangnya jaminan sosial dan perlindungan terhadap keluarga, menguatnya arus urbanisasi, dan yang lebih parahnya lagi kemiskinan menyebabkan jutaan rakyat memenuhi kebutuhan pangan dan san dan sandang secara terbatas.

Kemiskinan di kabupaten kepulauan sula merupakan salah satu penyakit dalam ekonomi, sehingga harus ada solusi atau kebijakan untuk mengurangi tingkat kemiskinan. Masalah kemiskinan merupakan masalah yang rumit dan kompleks serta bersifat multidimensional olehkarena itu, kebijakan yang dibuat untuk pengentasan kemiskinan pun harus dilakukan secara menyeluruh dan terpadu. Istilah kemiskinan adalah ketika seseorang atau kelompok

tidak mampu memenuhi kebutuhan atau kemakmuran ekonomi yang sesuai dengan standar hidup disuatu wilayah tertentu.

Provinsi Maluku Utara merupakan Provinsi yang tercatat pada tahun 2019 presentasi penduduk miskinnya mengalami peningkatan sebesar 6.77, kemiskinan yang terjadi di Provinsi Maluku Utara lebih dominan terjadi pada Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Maluku Utara seperti Kabupaten Halmahera Tengah, Halmahera Timur dan juga Kabupaten Kepulauan Sula seperti pada table 1.1. berikut

Tabel 1.1. Perkembangan Persentase Jumlah Penduduk Miskin, Jumlah Penduduk, Pengangguran, dan Pengeluaran Pemerintah Kep Sula Tahun 2001-2020

Tahun	pengangguran	Jumlah penduduk	Pengeluaran pemerintah	Kemiskinan
2001	-64	6.39	4.78	7.15
2002	2.70	5.54	4.41	6.92
2003	5.42	4.81	4.05	6.73
2004	7.52	4.22	3.72	6.57
2005	9.02	3.77	3.41	6.44
2006	9.90	3.44	3.11	6.34
2007	10.16	3.25	2.84	6.28
2008	9.81	3.19	2.60	6.25
2009	6.79	3.82	2.32	5.95
2010	6.03	3.80	2.14	6.11
2011	5.48	3.69	1.99	6.43
2012	5.14	3.49	1.87	6.91
2013	5.52	2.80	1.81	8.32
2014	5.39	2.58	1.77	8.80
2015	5.28	2.43	1.77	9.13
2016	5.17	2.35	1.81	9.31
2017	5.07	2.33	1.88	9.33
2018	4.97	2.38	1.98	9.20
2019	4.88	2.51	2.12	8.91
2020	4.80	2.70	2.30	8.48

Sumber: BPS Kab. Kepulauan Sula 2021

Dari data 1.1 menjelaskan kemiskinan ditahun 2019 meningkat sedangkan kemiskinan ditahun 2016,meningkat. Jumlah penduduk ditahun 2018 menurun sedangkan jumlah penduduk ditahun 2015 meningkat.Pengangguran ditahun 2015 meningkat sedangkan pangguran ditahun 2016 menurun.Pengeluaran pemerintah ditahun 2018 meningkat sedangkan pengangguran ditahun 2015 menurun. Dari data diatas juga dapat dilihat jumlah

penduduk miskin dari tahun 2001 sampai pada tahun 2020 terlihat terjadi peningkatan dari tahun ke tahun. Kemudian presentase jumlah penduduk menunjukkan ada yang berfluktuatif namun tidak terlalu besar perubahannya dari tahun 2015 hingga 2019 sedangkan pengangguran dan pengeluaran pemerintah juga menunjukkan tren yang berfluktuatif namun perubahannya cukup besar dari tahun ke tahun.

Dari uraian latarbelakang diatas maka dapat dirumuskan masalah penelitian ini sebagai berikut::

1.2 Rumusan Masalah

1. Apakah pengaruh pengangguran terhadap kemiskinan di Kabupaten Kepulauan Sula.
2. Apakah Pengaruh Pengeluaran Pemerintah terhadap kemiskinan di Kabupaten Kepulauan Sula.
3. Apakah Pengaruh jumlah Penduduk terhadap kemiskinan di Kabupaten Kepulauan Sula.
4. Apakah Secara simultan variabel Pengangguran, Pengeluaran Pemerintah, dan jumlah penduduk berpengaruh terhadap kemiskinan di Kabupaten kepulauan Sula.

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pengaruh pengangguran terhadap kemiskinan di Kabupaten Kepulauan Sula
2. Untuk mengetahui pengaruh Pengeluaran Pemerintah terhadap kemiskinan di Kabupaten Kepulauan Sula
3. Untuk mengetahui pengaruh jumlah Penduduk terhadap kemiskinan di Kabupaten Kepulauan Sula
4. Untuk mengetahui pengaruh kemiskinan di Kabupaten Kepulauan Sula

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat sebagai berikut:

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi untuk ilmu pengetahuann
2. Hasil penelitian ini dapat dipakai sebagai bahan akademik dan bahan pembanding bagi penelitian selanjutnya
3. Sebagai salah satu sumber informasi tentang permasalahan perkembangan kemiskinan di Kabupaten Kepulauan Sula